

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ENDRI NOVIAN, S.E.
NIP.197511092003121001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel dan Lampiran	6
Pernyataan Tanggung Jawab	9
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu	23
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran	24
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	44
C.3. Aset Lainnya.....	50
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	51
C.5. Ekuitas	52
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	53
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	53
D.2. Beban Pegawai.....	53

D.3.	Beban Persediaan	54
D.4.	Beban Barang dan Jasa	55
D.5.	Beban Pemeliharaan	55
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	56
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	56
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	57
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	58
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	58
D.11.	Beban Lain-lain.....	59
D.12.	Kegiatan Non Operasional	59
D.13.	Pos Luar Biasa	60
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	61
E.1.	Ekuitas Awal	61
E.2.	Surplus (Defisit) LO.....	61
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	61
E.4.	Koreksi Menambah/Mengurangi	61
E.4.1.	Penyesuaian Nilai Aset	61
E.4.2.	Koreksi Nilai Persediaan	61
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	63
	Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2018 disajikan pada lampiran.....	65
E.6.	Ekuitas Akhir.....	65
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	66
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	66
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	66
	Laporan-laporan Pendukung.....	69
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	70
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.....	73

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2019 dan 2018	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	27
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	30
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	31
Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	33
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2019	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2019 dan 2018	34
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019	35
Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019	35
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	36
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018	36
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018	37
Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018	38
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan 2018	38
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018.....	39
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018.....	39
Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018.....	41
Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	41
Tabel 20 Rincian Belanja Dibayar di Muka	42
Tabel 21 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	42
Tabel 22 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	43
Tabel 23 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018	43
Tabel 24 Rincian Aset Tetap.....	44
Tabel 25 Rincian Saldo Tanah.....	45
Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	49
Tabel 27 Rincian Aset Lainnya	50
Tabel 28 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018	51
Tabel 29 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	51
Tabel 30 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2019.....	53
Tabel 31 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	54
Tabel 32 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018	54
Tabel 33 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	55
Tabel 34 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018	56
Tabel 35 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018	56
Tabel 36 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	57
Tabel 37 Rincian Beban Bantuan Sosial.....	57
Tabel 38 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	58
Tabel 39 Rincian Beban Piutang tak Tertagih.....	59
Tabel 40 Rincian Beban Lain-lain.....	59

Tabel 41	Rincian Kegiatan Non Operasional	60
Tabel 42	Rincian Pos Luar Biasa	60
Tabel 43	Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	62
Tabel 44	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019	62
Tabel 45	Rincian Koreksi Lain-lain	63
Tabel 46	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	63
Tabel 47	Rincian Transfer Masuk	64
Tabel 48	Rincian Pengesahan Hibah	64
Tabel 49	Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019	71

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ENDRI NOVIAN, S.E.
NIP.197511092003121001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.30.215.155 atau mencapai 504 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.6.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.22.194.384.198 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.22.399.250.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019			TA 2018
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	6.000.000	30.215.155	504	18.564.203
Belanja Negara	22.399.250.000	22.194.384.198	99	19.165.292.528

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.37.162.509.265,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.24.330.150,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.37.138.169.115,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.10.000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.22.765.387,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.22.765.387,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.37.139.743.878,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	24.330.150	24.873.400	(543.250)	(2,18)
Aset Tetap	37.138.169.115	38.051.013.114	(912.843.999)	(2,40)
Aset Lainnya	10.000	10.000	(0)	0
Jumlah Aset	37.162.509.265	38.075.896.514	(913.387.249)	(2,40)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	22.765.387	19.273.568	3.491.819	18,12
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	22.765.387	19.273.568	3.491.819	18,12
Ekuitas				
Ekuitas	37.139.743.878	38.056.622.946	(916.879.068)	(2,41)
Jumlah Ekuitas	37.139.743.878	38.056.622.946	(916.879.068)	(2,41)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	37.162.509.265	38.075.896.514	(913.387.249)	(2,40)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.28.764.921,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.22.969.022.084,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(22.940.257.163,-).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.(252.766,-) dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(22.940.509.929,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp38.056.622.946,-, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(22.940.509.929,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.22.023.630.861,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.37.139.743.878,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	6.000.000	30.215.155	504	18.564.203
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		6.000.000	30.215.155	504	18.564.203
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	20.115.232.000	20.061.043.467	100	16.962.367.854
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2.149.518.000	2.000.388.731	93	1.456.213.810
3.	Belanja Modal	B.2.3.	134.500.000	132.952.000	99	746.710.864
	Jumlah Belanja Negara		22.399.250.000	22.194.384.198	99	19.165.292.528

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NERACA
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	7.500.000	7.500.000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.1. 3.	0	1.450.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR	C.1. 4.	0	(7.250)
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR (netto)</i>		0	1.442.750
Persediaan	C.1. 5.	16.830.150	15.930.650
Jumlah Aset Lancar		24.330.150	24.873.400
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	28.332.813.000	28.332.813.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.379.479.668	4.835.650.485
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	9.526.094.000	9.526.094.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	28.490.950	28.490.950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(5.128.708.503)	(4.672.035.321)
Jumlah Aset Tetap		37.138.169.115	38.051.013.114
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	515.952.903	95.074.896
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(515.942.903)	(95.064.896)

Jumlah Aset Lainnya		10.000	10.000
	Jumlah Aset	37.162.509.265	38.075.896.514
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	22.765.387	19.273.568
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22.765.387	19.273.568
	Jumlah Kewajiban	22.765.387	19.273.568
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	37.139.743.878	37.942.581.408
	Jumlah Ekuitas	37.139.743.878	38.056.622.946
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	37.162.509.265	38.075.896.514

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	28.764.921	17.874.230
Jumlah Pendapatan		28.764.921	17.874.230
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	20.062.739.099	16.963.192.774
Beban Persediaan	D. 3	50.179.450	43.906.600
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.168.437.690	821.857.860
Beban Pemeliharaan	D. 5	500.714.585	392.649.496
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	281.700.693	227.987.723
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	905.257.817	942.425.287
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	(7.250)	(6.900)
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		22.969.022.084	19.392.012.840
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(22.940.257.163)	(19.374.138.637)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(252.766)	721.000

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(252.766)	721.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(22.940.509.929)	(19.373.417.637)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(22.940.509.929)	(19.373.417.637)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E.1	38.056.622.946	37.942.581.408
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(22.940.509.929)	(19.373.417.637)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E.3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	25.898.270.405
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	(12.036.126)
Jumlah Koreksi Ekuitas		0	25.898.270.405
Transaksi Antar Entitas	E.5	22.023.630.861	19.487.459.175
Ekuitas Akhir		37.139.743.878	38.056.622.946

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas_pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.000.000	6.000.000
Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah	6.000.000	6.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	14.588.124.000	20.115.232.000
Belanja Barang	1.744.288.000	2.149.518.000
Belanja Modal	78.000.000	134.500.000
Jumlah Belanja	16.410.412.000	22.399.250.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
: Rp. 30.215.155

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.30.215.155 atau mencapai 503,59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.6.000.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.000.000	17.264.120	287,74
2.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	1.450.000	0,00

	Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	11.500.801	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	234	0,00
	Total Pendapatan	6.000.000	30.215.155	503,59

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.11.650.952 atau 62,76 persen dibandingkan TA 2018.

Hal ini disebabkan karena pada TA 2019 terdapat peningkatan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan adanya Pendapatan dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.264.120	17.874.203	(610.083)	(3,41)
2.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	1.450.000	690.000	760.000	110,14
3.	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	11.500.801	0	11.500.801	0
5.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	234	0	234	0
	Total Pendapatan	30.215.155	18.564.203	11.650.952	62,76

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara :

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2019 adalah

Rp.22.194.384.198

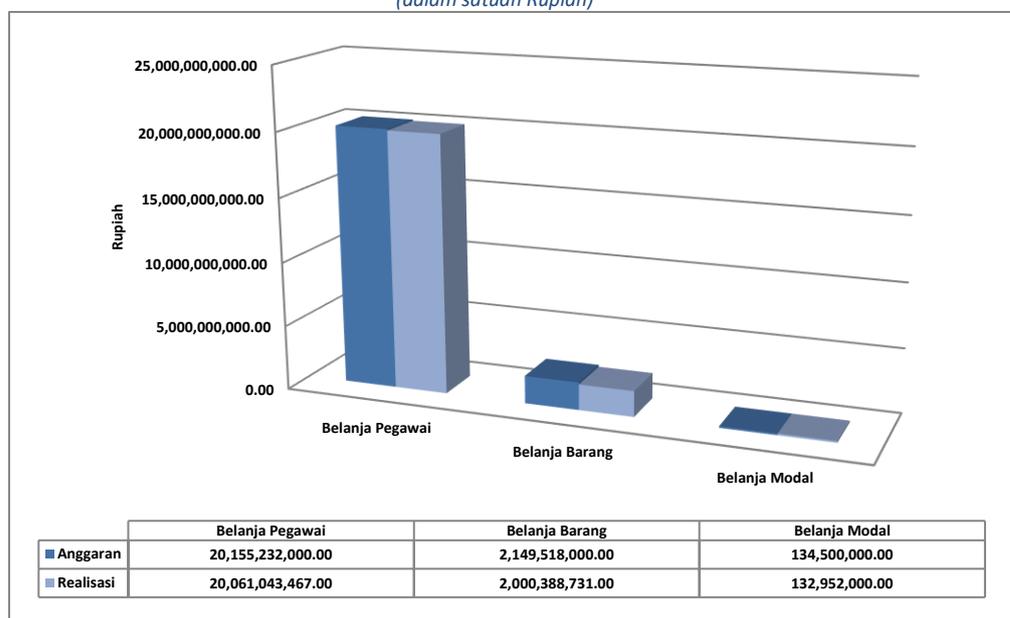
sebesar Rp.22.194.384.198 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99% dari anggaran senilai Rp.22.399.250.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	20.115.232.000	20.062.399.752	100
Belanja Barang	2.149.518.000	2.000.388.731	93
Belanja Modal	134.500.000	132.952.000	99
Total Belanja Bruto	22.399.250.000	22.195.740.483	99
Pengembalian Belanja	0	1.356.285	0
Total Belanja Netto	22.399.250.000	22.194.384.198	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) 2019 & 2018

Realisasi Belanja Negara mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.029.091.670 atau sebesar 15,81 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah pagu anggaran untuk Pengadilan

Tinggi Bengkulu terutama untuk pagu anggaran Belanja Pegawai.

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	20.061.043.467	16.962.367.854	3.098.675.613	18,27
Belanja Barang	2.000.388.731	1.456.213.810	544.174.921	37,37
Belanja Modal	132.952.000	746.710.864	(613.758.864)	(82,19)
Total Belanja	22.194.384.198	19.165.292.528	3.029.091.670	15,81

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp.
20.061.043.467

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.20.061.043.467 dan Rp. 16.962.367.854.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami peningkatan sebesar 22,18 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena penyerapan Belanja Pegawai sudah optimal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.630.565.120	3.874.081.000	756.484.120	19,53
Belanja Pembulatan Gaji PNS	57.721	48.212	9.509	19,72
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	373.931.930	317.522.420	56.409.510	17,77
Belanja Tunj. Anak PNS	67.132.796	58.145.102	8.987.694	15,46
Belanja Tunj. Struktural PNS	69.570.000	92.790.000	(23.220.000)	(25,02)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	11.234.760.000	9.376.340.000	1.858.420.000	19,82
Belanja Tunj. PPh PNS	2.141.171.325	1.785.614.580	355.556.745	19,91
Belanja Tunj. Beras PNS	163.726.860	149.909.400	13.817.460	9,22

Belanja Uang Makan PNS	629.729.000	557.123.000	72.606.000	13,03
Belanja Tunjangan Umum PNS	51.755.000	51.350.000	405.000	0,79
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	700.000.000	700.000.000	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	20.062.399.752	16.962.923.714	3.099.476.038	18,27
Pengembalian Belanja	(1.356.285)	(555.860)	(800.425)	144
Total Belanja Netto	20.061.043.467	16.962.367.854	3.098.675.613	18,27

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp.2.000.388.731

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.2.000.388.731 dan Rp. 1.456.213.810.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami peningkatan sebesar 37,37 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya Belanja Jasa dan Belanja Pemeliharaan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	610.855.705	530.768.315	80.087.390	15,09
Belanja Barang Non Operasional	33.582.800	32.630.773	952.027	2,92
Belanja Jasa	522.202.998	235.472.303	286.730.690	121,77
Belanja Pemeliharaan	486.574.235	377.761.996	108.812.239	28,80
Belanja Perjalanan Dinas	281.700.693	228.623.723	53.076.970	23,21
Belanja Barang Persediaan	65.472.300	51.592.700	13.879.600	26,90
Total Belanja Brutto	2.000.388.731	1.456.849.810	543.538.921	37,31
Pengembalian Belanja	0	(636.000)	636.000	(100)
Total Belanja Netto	2.000.388.731	1.456.213.810	544.174.921	37,37

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal : Rp.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2019 dan TA

2018 adalah sebesar Rp.132.952.000 dan Rp. 746.710.864. Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar 82,20 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain menurunnya pagu anggaran Belanja Modal pada TA 2019. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	132.952.000	746.710.864	(613.785.864)	(82,20)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	132.952.000	746.710.864	(613.785.864)	(82,20)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	132.952.000	746.710.864	(613.785.864)	(82,20)

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi tersebut pada TA 2019 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2018.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0	0

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebesar Rp.132.952.000, mengalami penurunan sebesar (82,19) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 746.710.864.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp.	%
Alat Kantor	0	158.703.410	(158.703.410)	(100)
Alat Rumah Tangga	0	382.255.500	(382.255.500)	(100)
Alat Studio	0	0	0	0
Komputer Unit	126.351.000	158.576.454	(32.225.454)	
Peralatan Komputer	6.601.000	47.175.500	(40.574.500)	(86,01)
Total Belanja Brutto	132.952.000	746.710.864	(613.758.864)	(82,19)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	132.952.000	746.710.864	(613.758.864)	(82,19)

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2019 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan Realisasi TA 2018.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp.	%
Gedung Tempat Kerja	0	0	0	0

Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.24.330.150

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.24.330.150 dan Rp.24.873.400 . Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	7.500.000	7.500.000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	0	1.450.000
Penyisihan Piutang tidak tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	0	(7.250)
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR (netto)</i>	0	1.442.750
Persediaan	16.830.150	15.930.650
Total Aset Lancar	24.330.150	24.873.400

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1.	Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah		0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp.7.500.000

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.7.500.000 dan Rp.7.500.000 . Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 20 Rincian Belanja Dibayar di Muka

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Penerimaan Kembali Persekot /Uang Muka Gaji	0	0
2.	Sewa Rumah Dinas Hakim Tipikor	7.500.000	7.500.000
Jumlah		7.500.000	7.500.000

C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi: Rp.0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.1.450.000 . Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2019

No.	Debitur	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
1	Kamal Abdul Naser, SH	0	1.450.000
Jumlah Total		0	1.450.000

C.1.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Bagian Lancar
TP/TGR : 0*

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0 dan Rp.(Rp.7.250). Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

Tabel 22 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
(dalam satuan Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
1	Kamal Abdul Naser, SH	Lancar	0	0	0
JUMLAH					0

C.1.5. Persediaan

*Persediaan:
Rp.16.830.150*

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.16.830.150 dan Rp.15.930.650. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	16.830.150	11.453.400
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	4.477.250
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		16.830.150	15.930.650

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
37.138.169.115*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp.37.138.169.115 dan Rp.38.051.013.114. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	28.332.813.000	28.332.813.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.379.479.668	4.835.650.485	(456.170.817)
3	Gedung dan Bangunan	9.526.094.000	9.526.094.000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	28.490.950	28.490.950	0

6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	42.266.877.618	42.723.048.435	(456.170.817)
	Akumulasi Penyusutan	(5.128.708.503)	(4.672.035.321)	(456.673.182)
	Nilai Buku Aset Tetap	37.138.169.115	38.051.013.114	(912.843.999)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp.28.332.813.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.28.332.813.000 dan Rp.28.332.813.000. Nilai Perolehan Aset berupa Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.28.332.813.000 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Mutasi transaksi terhadap Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	28.332.813.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2019	28.332.813.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	28.332.813.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.01.002.1	1.195	A 1429085	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	491.231.000
2.	2.01.01.01.002.2	2.010	A 1429094	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	904.886.000

3.	2.01.01.01.002.3	1.933	A 1430646	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas KPT dan WKPT	4.747.422.000
4.	2.01.01.01.002.4	586	07.04.03.09.4.00011	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	1.480.378.000
5.	2.01.01.04.001.1	8.958	07.04.03.04.4.00083	Pemerintah RI cq. MARI	Gedung Kantor PT Bengkulu	20.710.896.000
Jumlah						28.332.813.0000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
4.379.479.668*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.4.379.479.668 dan Rp.4.835.650.485.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	4.835.650.485
Mutasi Tambah	
Pembelian	217.129.000
Hibah	0
Reklas Masuk	0
Mutasi Kurang	
Reklas Keluar	673.299.817
Saldo per 31 Desember 2019	4.379.479.668
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(3.668.595.845)
Nilai Buku 31 Desember 2018	710.883.823

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.217.129.000. Mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi tambah :

Pembelian 4 unit White Board Rp.121.400; 5 unit UPS Rp.35.306.000; 4 unit PC senilai Rp.48.749.600; 10 unit Laptop senilai Rp.126.351.000; 1 unit Monitor senilai Rp.4.255.000; 1 unit Printer senilai Rp.2.346.000;

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
9.526.094.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.9.526.094.000 dan Rp.9.526.094.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	9.526.094.000
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	0
Hibah	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2019	9.526.094.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(1.460.112.658)
Nilai Buku 31 Desember 2019	8.065.981.342

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar 9.526.094.000 tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,
dan Jaringan : Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0

Nilai Buku 31 Desember 2019 0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp.28.490.950*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 28.490.950 dan Rp. 28.490.950.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.28.490.950 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	28.490.950
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Saldo per 31 Desember 2019	28.490.950
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	28.490.950

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(5.128.708.503)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp.(5.128.708.503) dan Rp.(4.672.035.321).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah ini, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.379.479.668	(3.668.595.845)	710.883.823
2	Gedung dan Bangunan	9.526.094.000	(1.460.112.658)	8.065,981.342
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	28.490.950	0	28.490.950
	Jumlah	13.934.064.618	(5.128.708.503)	8.805.356.115

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.10.000 dan Rp.10.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 27 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	515.952.903	95.074.896
3	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	515.952.903	95.074.896
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(515.942.903)	(95.064.896)
	Nilai buku Aset Lainnya	10.000	10.000

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp.515.952.903

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.515.952.903 dan Rp.95.074.896 . Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	95.074.896
Mutasi Tambah	420.999.407
Mutasi Kurang	121.400
Saldo per 31 Desember 2019	515.952.903

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/Amort
isasi Aset Lainnya :

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah

Rp.515.942.903 masing-masing Rp.515.942.903 dan Rp.95.064.896. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek :
Rp.22.765.387*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.22.765.387 dan Rp.19.273.568 . Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 28 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Utang Kepada Pihak Ketiga	22.765.387	19.273.568
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	22.765.387	19.273.568

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga:
Rp.22.765.387*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.22.765.387 dan Rp.19.273.568. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
3.	Beban Tunj.Fungsional	1.225.000	
4.	Beban Tunj. Struktural	765.000	
5.	Beban Tunj. PPh PNS	530.552	
6.	Beban Langganan Telepn	296.627	
7.	Beban Langganan Listrik	13.753.208	
8.	Beban Langganan Air	199.000	
9.	Beban Keperluan Perkantoran	5.996.000	
	Jumlah	22.765.387	

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
37.139.743.878

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.37.139.743.878 dan Rp.38.056.622.946 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbP
: Rp.28.764.921

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.28.764.921 dan Rp.17.874.203 . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 30 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.000.000	17.264.120	287,74
2.	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	11.500.801	0
Total Pendapatan		6.000.000	28.764.921	287,74

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp.20.062.739.099

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.20.062.739.099 dan Rp.16.963.192.774 .

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 31 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.629.482.720	3.874.802.500	754.680.220	19,47
Beban Pembulatan Gaji PNS	52.788	47.384	5.404	11,40
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	373.834.250	317.594.570	56.239.680	17,70
Beban Tunj. Anak PNS	67.105.010	58.166.234	8.938.776	15,36
Beban Tunj. Struktural PNS	70.335.000	92.790.000	(22.455.000)	(24,19)
Beban Tunj. Fungsional PNS	11.235.985.000	9.376.340.000	1.859.645.000	19,83
Beban Tunj. PPh PNS	2.141.691.771	1.785.624.686	356.067.085	19,94
Beban Tunj. Beras PNS	163.726.860	149.909.400	13.817.460	9,21
Beban Uang Makan PNS	628.955.700	557.123.000	71.832.700	12,89
Beban Tunjangan Umum PNS	51.570.000	50.795.000	775.000	1,52
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	700.000.000	700.000.000	0	0
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	20.062.739.099	16.963.192.774	3.099.546.325	18,27

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp.50.179.450*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.50.179.450 dan Rp.43.906.600 .

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	50.179.450	43.906.600	6.272.850	14,28
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0	0,00
Total Beban Persediaan	50.179.450	43.906.600	6.272.850	14,28

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang &
Jasa :
Rp.1.168.437.690*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.168.437.690 dan Rp.821.857.860 . Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	413.664.090	414.572.675	(908.585)	24,49
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.828.8000	13.295.700	6.533.100	5,97
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	69.000.000	58.550.000	10.450.000	(13,13)
Beban Barang Operasional Lainnya	110.170.315	45.348.440	64.821.875	(55,02)
Beban Bahan	0	32.630.773	(32.630.773)	(1,27)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	33.582.800	0	33.582.800	
Beban Langganan Listrik	169.919.941	154.535.446	15.384.495	28,55
Beban Langganan Telepon	14.058.112	12.878.660	1.179.452	84,43
Beban Langganan Air	2.264.500	23.087.500	(20.823.000)	14,80
Beban Sewa	335.949.132	44.166.666	291.782.466	4,95
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	22.792.000	(22.792.000)	0
Total Beban Barang dan Jasa	1.168.437.690	821.857.860	346.579..830	42,17

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.500.714.585*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.500.714.585 dan Rp.392.649.496. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	231.579.657	139.364.960	92.214.697	66,16
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	44.698.000	58.150.000	(13.452.000)	(23,13)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.296.578	180.247.036	30.049.542	16,67
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	14.140.350	14.887.500	(747.150)	(5,01)
Total Beban Pemeliharaan	500.714.585	392.649.496	108.065.089	27,52

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas :
Rp.281.700.693

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.281.700.693 dan Rp.227.987.723 . Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	275.250.693	224.987.723	50.262.970	22,34
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	6.450.000	3.000.000	3.450.000	115
Total Beban Perjalanan Dinas	281.700.693	227.987.723	53.712.970	23,56

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat : Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi	0	0	0	0

Sosial				
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.905.257.817

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.905.257.817 dan Rp.942.425.287 . Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	319.866.934	357.069.404	(37.202.470)	(10,41)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	585.355.883	585.355.883	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	35.000	0	35.000	0
Jumlah Penyusutan	905.257.817	942.425.287	(37.167.470)	(3,94)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	905.257.817	942.425.287	(37.167.470)	(3,94)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi

Tertagih : ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp.7.250) dan (Rp.6.900) .

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(7.250)	(6.900)	(350)	5,07
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	(7.250)	(6.900)	(350)	5,07

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non Operasional :
Rp.(252.766)*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(252.766)	721.000	(973.766)	(135.05)
Total Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional	(252.766)	721.000	(973.766)	(135.05)

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.38.056.622.946 dan Rp.37.942.581.408 .

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.(22.940.509.929) dan Rp.(19.373.417.637). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan mendasar : Rp.0. Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019

E.4. Koreksi Menambah/Mengurangi

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp.0. Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap : Rp.0.*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi: Rp.0.*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

Tabel 44 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-
lain : Rp.0*

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 .

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Utang	0
Koreksi Hibah	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas :
Rp.22.023.630.861

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.22.023.630.861 dan Rp.19.487.459.175 . Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.194.384.198
Diterima dari Entitas Lain	(30.215.155)
Transfer Keluar	(224.593.782)
Transfer Masuk	84.055.600
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	22.023.630.861

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp.(30.215.155) sedangkan

DKEL sebesar Rp.22.194.384.198.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. terdapat transaksi Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Tabel 47 Rincian Transfer Masuk
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
Peralatan & Mesin	Badan Urusan Administrasi MA RI	84.055.600
Jumlah		84.055.600

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2019. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pengesahan Hibah
(dalam satuan Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah

Total Pengesahan	0
Pengesahan Pengembalian Hibah	0
Jumlah	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp.37.139.743.878

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.37.139.743.878 dan Rp.38.056.622.946 .

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun semester lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terdapat Pendapatan dan Belanja secara Akrual yang perlu dijelaskan pada Tahun Anggaran 2019.

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar berupa Kekurangan Gaji An. Tavip Dwiyatmiko, SH., MH sebesar Rp.1.225.000 dan An. Endri Novian, SE sejumlah Rp.765.000 selama 1 bulan.

Belanja Barang yang masih harus dibayar berupa belanja langganan listrik Rp.13.753.208; langganan telepon Rp.296.627; langganan pdam Rp. 199.000; dan Belanja keperluan kantor Rp.5.996.000.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

BRI Cabang Bengkulu A/C 0115-01-001585-30-1 A.n BPG 016 Pengadilan Tinggi Bengkulu yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-118/WPB.09/KP.016/2015 Tanggal 28 Januari 2015.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-1 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 28 Maret 2019
2. Revisi DIPA ke-2 Halaman ke-III DIPA Rencana Penarikan tanggal 30 April 2019
3. Revisi DIPA ke-3 Halaman ke-III DIPA Rencana Penarikan dan Penambahan Pagu Belanja tanggal 29 Mei 2018
4. Revisi DIPA ke-4 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 28 Juni 2019
5. Revisi DIPA ke-5 tanggal 19 Agustus 2019
6. Revisi DIPA ke-6 tanggal 28 Agustus 2019
7. Revisi DIPA ke-7 tanggal 13 September 2019
8. Revisi DIPA ke-8 tanggal 14 Oktober 2019
9. Revisi DIPA ke-9 tanggal 5 November 2019
10. Revisi DIPA ke-10 tanggal 19 November 2019
11. Revisi DIPA ke-11 tanggal 20 Desember 2019
12. Revisi DIPA ke-12 tanggal 26 Desember 2019

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB pada Tahun Anggaran 2019 ini sebagai berikut :

Ralat SPM Nomor 00043/400512/2019 tanggal 01 April 2019 karena kesalahan uraian SPM.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 799/SEK/Kp.ISK/X/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Persadilan di Bawahnya.

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Umi Kalsum, S.Sos

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Endri Novian, SE

2. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : W8-U/2385/KP.01.3/10/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas Pembuat

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Semula :

Pejabat Pembuat Komitmen : Linda Nora, S.Kom, SH

Menjadi :

Pejabat Pembuat Komitmen : Umi Kalsum, S.Sos

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin		4.375.224.668	3.503.786.881	710.883.823
1.	Alat Bantu	7	0	0	0
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.321.887.912	1.321.887.912	0
3.	Alat Ukur	5	0	0	0
4.	Alat Kantor	5	479.506.870	362.345.670	117.161.200
5.	Alat Rumah Tangga	5	1.469.084.181	1.213.131.781	255.952.400
6.	Alat Studio	5	84.095.000	28.857.000	55.238.000
7.	Alat Komunikasi	5	24.189.279	24.189.279	0
8.	Alat Kedokteran	5	0	0	0
9.	Peralatan Pemancar	8	199.100.000	89.595.000	109.505.000
10.	Komputer Unit	4	674.715.020	376.019.958	298.695.062
11.	Peralatan Komputer	4	115.246.406	80.360.281	34.886.125
12.	Unit Peralatan Proses/produksi	8	6.600.000	6.600.000	0
13.	Peralatan Olah Raga	3	800.000	800.000	0
B.	Gedung dan Bangunan		9.526.094.000	1.460.112.658	8.065.981.342
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7.197.136.000	835.888.804	6.361.247.196
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.328.958.000	331.545.912	1.997.412.088
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	0	0	0
2.	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		95.064.896	95.064.896	0
1.	Alat Bantu	7	0	0	0
2.	Alat Kantor	5	35.578.958	35.578.958	0
3.	Alat Rumah Tangga	5	184.382.855	184.382.855	0
4.	Alat Komunikasi	5	16.730.937	16.730.937	0

5. Komputer Unit	4	202.731.228	202.731.228	0
6. Peralatan Komputer	4	62.121.425	62.121.425	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		14.417.261.571	5.187.164.500	9.689.709.164
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		14.417.261.571	5.187.164.500	9.689.709.164

B. INFORMASI HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
 DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
 PER 31 Desember 2019

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
1.						
2.		N	I	H	I	L
3.						
JUMLAH		0	0	0	0	0

